

**Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Salah
Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumenep**

***Analysis Of Income At Sharia People's Financing Banks (BPRS) As One Of The
Sources Of Original Income (PAD) In Sumenep District***

Oleh :

Sri Nur Hasanah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

Anaahasanah7@gmail.com

Abstract

This research analyzes the income of the Bhakti Sumekar Sharia People's Financing Bank (BPRS) as a source of Regional Original Income (PAD) in Sumenep Regency. BPRS is a community bank located in the region. As a bank with a sharia system that is implemented, this sharia financial institution is very important to be established in every region in Indonesia, especially in Madura. The methodology used in this research is qualitative with a descriptive approach. The aim of this research is to determine the Income Analysis of the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Bhakti Sumekar as a source of Regional Original Income (PAD) in Sumenep Regency. In this research, data collection was obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and verification/drawing conclusions. The results of this research show that the Operational Income of Sharia People's Financing Banks (BPRS) is IDR 5,086,734 and the Non-Operational Income of Sharia People's Financing Banks (BPRS) is IDR. 977,880.

Keywords : Bank Income, BPRS, Regional Original Income (PAD)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep. BPRS merupakan bank komunitas yang bertempat di daerah. Sebagai bank dengan sistem syariah yang dijalankan, lembaga keuangan syariah ini sangat penting untuk dididrikan di setiap daerah di Indonesia khususnya di Madura. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp.5.086.734 dan Pendapatan Non Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah Rp. 977.880.

Kata Kunci : Pendapatan Bank, BPRS, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Sumenep. Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemnafaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam memepertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah

harus mengoptimalkan peran BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD (Samidi : 2021).

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah melalui pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai indikator yang dipengaruhi tinggi rendahnya penghasilan daerah tersebut, dapat dilihat dari tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh faktor baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Sudarsono & Resdianto, 2011).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari

pendapatan BUMD, BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMD didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah maka diharapkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat (Hartati, 2013).

Salah satu daerah yang berpotensi dalam meningkatkan PAD yaitu pulau Madura dimana letaknya berada disebelah timur laut Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan “pulau garam”. Pulau Madura terdiri dari beberapa kabupaten diantaranya

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten

tersebut memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang ada dan berkembang di kabupaten kabupaten tersebut salah satunya ialah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi, serta pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian,2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungutberdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah lainnya yang Dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Selain itu

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berperan untuk mengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh suatu daerah. Oleh karena itu dari ke empat sumber diatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Badan Usaha yang bersumber dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Sehingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perlu diketahui jumlah PAD di Kabupaten Sumenep selama tiga tahun terakhir, secara akumulatif mengalami peningkatan yang positif. Pada tahun 2021 jumlah PAD Kabupaten Sumenep senilai Rp. 2.311.242.385.198. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.349.231.639.361. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah PAD Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.420.643.286.694. (Sumber :

data APBD Kabupaten Sumenep)

Dalam hal tersebut pendapatan (*Revenue*) suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya, Harnanto (2019:102) maka pendapatan dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu Pendapatan Operasional (*Operating Revenue*) dan Pendapatan Non Operasional (*Non Operating Revenue*) :

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu

yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah; dan *good governance*.

Chandler dan Plano (2004 : 8) : Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel public di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi public merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan public untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya.

2.1 Administrasi Keuangan dan Teori Pendapatan Asli Daerah

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009). *The liang gie* (Pasolong, 2011) mendefenisikan Administrasi

adalahrangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orangdi dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Menurut Taluke 2013, Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Muhtarom 2016, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau

fasilitas yang berlaku di pemerintah daerah. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan formil maupun materil.

a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

Menurut Muhtarom 2016, hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan.

Pendapatan (*Revenue*) suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya, (Harnanto 2019:102) maka pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Operasional (*Operating Revenue*) dan Pendapatan Non Operasional (*Operating Non*

Revenue) :

- 1) Pendapatan operasional (*Operating Revenue*) adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan.

- 2) Pendapatan Non Operasional (*Operating Non Revenue*)

Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan lain-lain yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya

sumbangan pada pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.2 Badan Usaha Milik daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD (Samidi:2021). Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1. BUMD di dirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
2. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya;
3. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
4. BUMD pemimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota, atau

- gubernur);
5. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan asli daerah;
 6. Sebagai instrument penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;
 7. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah
 8. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti Lembaga perbankan dan non perbankan.

Selain itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah melalui penghasilan yang dihasilkan dari operasi bisnisnya. Pendapatan ini berasal dari penjualan produk atau jasa, royalti, dividen, dan lain sebagainya, sebagian dari pendapatan ini masuk ke kas daerah dan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, BUMD tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset dan penghasil pendapatan bagi daerah, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung keuangan daerah dan pembangunan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan deskriptif. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:208), menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian ini fokus penelitian di dasarkan kepada teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi 2 yaitu : Pendapatan Operasional (*Operating Revenue*) dan Pendapatan Non Operasional (*Operating Non Revenue*)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai sumber utama dalam pencarian data-data dan informasi serta jawaban dari apa yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Lokasi dari penelitian ini adalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dengan metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan deskriptif.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi

dan dokumentasi, maka dapat diperoleh bahwa pengembangan ekonomi lokal sudah memenuhi aspek-aspek pengembangan ekonomi lokal menurut (Bartik dalam Saragih, 2018).

**A. Pendapatan Operasional
(Operating Revenue)**

Menurut (Harnanto 2019:102) Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Setiap perusahaan memiliki pendapatan operasional yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari usaha pokok perusahaan.

Pendapatan Operasional pada

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah pendapatan yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

1. Mudharabah merupakan pendapatan berdasarkan bagi hasil dari usaha yang dilakukan bank dengan nasabahnya. Bank syariah akan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang dilakukan dengan nasabah yang menjadi mitra mudharabah. Mudharabah adalah salah satu dari prinsip-prinsip keuangan islam yang mengatur hubungan antara pihak penyedia modal yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib).

2. Murabahah merupakan produk perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyimpan uang dengan prinsip jual beli barang atau jasa secara halal sesuai dengan syariat islam. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang atau jasa yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan murabahah ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah

yang ingin menyimpan uang tanpa melibatkan riba maupun bunga.

3. Musyarakah merupakan produk tabungan Tabungan musyarakah adalah produk perbankan syariah di mana dana nasabah digunakan untuk melakukan investasi dalam bentuk kerjasama (musyarakah) antara bank dan nasabah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak.

4. Ijarah merupakan Tabungan Ijarah adalah produk perbankan syariah yang menawarkan cara untuk menyimpan uang dengan prinsip-prinsip syariah. Istilah "Ijarah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti sewa atau kontrak. Dalam konteks tabungan, prinsip ini diterapkan dengan cara bank sebagai pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, sementara nasabah membayar sewa atas penggunaan aset tersebut.

5. Wakalah merupakan Tabungan Muwakalah adalah produk tabungan syariah yang umumnya ditawarkan oleh bank-bank syariah.

Prinsip utama

dari Tabungan Muwakalah adalah bahwa nasabah menyimpan uangnya di bank, dan bank menggunakan uang tersebut untuk melakukan investasi atau kegiatan lain yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Hibah Tabungan hibah di bank pembiayaan rakyat syariah adalah jenis tabungan yang berdasarkan prinsip syariah Islam, di mana bank memberikan hadiah kepada nasabah sebagai penghargaan atas penyimpanannya. Hadiah ini diberikan tanpa adanya janji atau imbalan yang pasti, sesuai dengan prinsip mudharabah atau bagian keuntungan bersama antara bank dan nasabah. Dalam konteks ini, tabungan hibah berbeda dengan tabungan konvensional yang memberikan bunga tetap atau tergantung pada suku bunga.

7. *Fee based income* merupakan pendapatan dari biaya-biaya administratif, penyelesaian transaksi, dan layanan lain yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Produk tabungan *fee based income* pada bank pembiayaan rakyat mengacu pada pendapatan yang diperoleh oleh bank tersebut dari

berbagai jenis biaya yang dikenakan kepada nasabah atas layanan terkait produk tabungan.

Sumber sumber pendapatan diatas mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimana keuntungan diperoleh dari aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara bank dan nasabahnya.. Sumber pendapatan diatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memperoleh laba dan laba tersebut merupakan keuntungan bersih yang didapat setelah dikurangkan dengan semua biaya operasional yang dikeluarkan oleh BPRS. Biaya operasional merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPRS dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini termasuk berbagai macam biaya seperti gaji karyawan, biaya listrik, air, bahan-bahan, biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis BPRS tersebut.

Data tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2023 menunjukkan laba bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai Rp. 10,178,892 . yang diperoleh dari pendapatan

operasional sejumlah Rp. 5.086.734. Tidak hanya itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga harus memastikan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana,serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam fatwa- fatwa syariah. Dan dalam praktiknya, pendapatan operasional ini sangat penting bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keuntungan yang sah secara hukum dan moral menurut pandangan islam.

B. Pendapatan Non Operasional (Operating Non Revenue)

Pendapatan Non Operasional bank merupakan pendapatan yang diterima oleh bank dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) umumnya memiliki aset fisik berupa properti seperti gedung kantor atau cabang, peralatan kantor, kendaraan operasional dan inventaris atau barang modal lainnya yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aset fisik ini penting untuk mendukung kegiatan operasional

dan layanan kepada nasabah.

(Harnanto 2019:102) Jenis pendapatan non operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berasal dari sumber sebagai berikut :

1. Pendapatan dari investasi surat berharga : bank dapat memperoleh pendapatan dari hasil investasi dalam surat berharga seperti obligasi, sukuk, atau instrumen keuangan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pendapatan dari sewa : pendapatan dari sewa bisa berasal dari aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, seperti properti atau peralatan lain yang disewakan kepada pihak ketiga. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menyewakan berbagai jenis aset untuk mendapatkan Pendapatan Non Operasional
3. Keuntungan dari transaksi mata uang asing : bank bisa memperoleh keuntungan dari transaksi valuta asing (*forex*) yang dilakukan untuk keperluan hedging tau spekulasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal tersebut hubungan peningkatan pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi melalui beberapa mekanisme.

Salah satunya adalah melalui kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan pendapatandan produktivitas di daerah Sumenep. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setiap tahunnya mengalami peningkatan nasabah yang emnunjukkan BPRS berhasil menjangkau lebih banyak masyarakat dan mengembangkan layanan BPRS di Kabupaten Sumenep. Hal ini juga dapat meningkatkan transaksi ekonomi lokal dan secaratidak langsung berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah.

Dalam data laporan tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2023 menunjukkan laba bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai Rp. 10,178,892 . pendapatan yang berasal dari kegiatan non operasional sejumlah Rp. 977.880 . setelah dikurangi pembiayaan beban lainnya. (Sumber : Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2023).

5. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa :

**A. Pendapatan Operasional
(Operating Revenue)**

Pendapatan operasional pada Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) meliputi berbagai sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional utama bank BPRS Bhakti Sumekar. Dengan prinsip yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapatan ini tidak hanya penting untuk mendukung operasional bank, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis serta kontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Dalam data tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2023 menunjukkan laba bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai Rp. 10,178,892 . yang diperoleh dari pendapatan operasional sejumlah Rp. 5.086.734.

**B. Pendapatan Non Operasional
(Operating Non Revenue)**

Pendapatan non operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan tambahan dari pendapatan operasional bank. dan pendapatan ini tidak berasal dari kegiatan utama bank. Contohnya termasuk pendapatan dari investasi,

bunga deposito, atau pendapatan dari layanan keuangan tambahan seperti biaya administrasi dan komisi. Pendapatan non operasional ini penting untuk membantu meningkatkan pendapatan total bank dan juga pendapatan daerah secara keseluruhan. Sumber Pendapatan Non Operasional meliputi : pendapatan investasi surat berharga, pendapatan sewa aset, dan pendapatan transaksi mata uang asing.

Dalam data laporan tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2023 menunjukkan laba bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai Rp. 10,178,892 . pendapatan yang berasal dari kegiatan non operasional sejumlah Rp. 977.880 .

Saran

Dari data penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas maka peneliti memiliki beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional BPRS

Bank BPRS perlu terus meningkatkan setiap layanan kemudahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan membantu usaha masyarakat dengan memberikan kemudahan pada setiap produk tabungan BPRS agar dapat menjawab permasalahan masyarakat khususnya dibidang keuangan dan dapat menambah jumlah nasabah sehingga

dapat meningkatkan pendapatan BPRS
dan Sumbangsih terhadap PAD.

Pendapatan Non Operasional

Bank BPRS perlu untuk terus
meningkatkan aset dan kerja sama
dengan pihak lain seperti dengan
bank lain maupun dengan pihak
ketiga lainnya yang dapat membantu
meningkatkan pendapatan non
operasional BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

A, Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Tabungan Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Chaerunnisa, D. N. (2014). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Sukabumi Tahun 1990 – 2012. *Skripsi*

Jurnal Penelitian, Bobi Dermawan (2020) “*Studi Komparatif Strategi Diferensiasi pada BPRS Adam Bengkulu dan BRI Syariah Cabang Bengkulu*”

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6112/1/Skripsi%20SELLY.pdf>

Kabupaten Sumenep. PT. BPRS Raih 3 Penghargaan dari info bank syariah awards. Diakses dari <http://www.sumenep.go.id>.

Karim, Aduwarman. 2013. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Press

Laporan Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar

<https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/#struktur>

Laili, Ana Susanti. 2016. “*Pengaruh Pendapatan Operasional, Biaya*

Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah”. Skripsi IAIN Tulungagung.

Laba BPR Bangkalan Tahun 2021

<https://www.koranmadura.com/2022/01/laba-bpr-bangkalan-tahun-2021-capai-rp-655-juta-55-persen-sektor-ke-pemkab/>